KAJIAN GEOGRAFI POLITIK TENTANG HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2015

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si)

OLEH :
ANGGI PRADANA WIRANATA
1305864

PROGRAM STUDI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul	: Kajian Geografi Politik Tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015
Nama	: ANGGI PRADANA WIRANATA
NIM/TM	: 1305864/2013
Program Studi	: Geografi
Jurusan	: Geografi
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 18 Juli 2018

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Rahmanelli, M.Pd	Dr. Yudi Antomi, M.Si
NIP. 19600307 198503 2 002	NIP. 19681210 200801 1012

Mengetahui :
Ketua Jurusan Geografi

Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu, Tanggal 18 Juli 2018 Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB

Kajian Geografi Politik Tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015

Nama	: ANGGI PRADANA WIRANATA
NIM/TM	: 1305864/2013
Program Studi	: Geografi
Jurusan	: Geografi
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang. 18 Juli 2018

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Tim Penguji : Widya Prarikeslan,S.Si M.Si	
2. Anggota Penguji I : Ratna Wilis S.Pd, M.P	
3. Anggota Penguji II : Drs. Afdhal, M.Pd	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp. 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	**: Anggi Pradana Wiranata**
NIM/TM	**: 1305864/2013**
Program Studi	**: Geografi**
Jurusan	**: Geografi**
Fakultas	**: FIS UNP**

Dengan ini menyatakan, bahwa Skripsi saya dengan judul:

Kajian Geografi Politik Tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,

Ketua Jurusan Geografi

Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP.19620603 198603 2 001

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 99435AFF279264299 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Anggi Pradana Wiranata
NIM.1305864/2013

ABSTRAK

Anggi Pradana Wiranata (2013) : **Kajian Geografi Politik Tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) distribusi keruangan perolehan suara pasangan calon kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015, 2) faktor sosiologis pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Metode dalam penelitian dengan *mixed methods*. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan dengan populasi sebanyak 76.800 pemilih dengan sampel sebanyak 100 pemilih. Sampel penelitian menggunakan rumus *Slovin.* Teknik pengumpulan data dengan kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data berasal data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan, 1) terdapat segresi distribusi suara dimana pasangan H.Muzni Zakaria dan H. Abdur Rahman menguasai Kabupaten Solok Selatan di bagian Barat sedangkan pasangan H. Khairunnas dan Edi Susanto menguasai dibagian Timurnya, 2) Faktor sosiologis pemilih seperti agama tidak menjadi pertimbangan pemilih didalam menentukan hak politiknya sedangan faktor sosiologis pemilih seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, suku dan tingkat pendapatan pemilih ditemukan menjadi pertimbangan pemilih didalam menentukan pilihan politiknya.

Kata kunci : geografi politik, pemilihan kepala daerah, distribusi keruangan, faktor sosiologis pemilih

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sembah dan puji penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Kajian Geografi Politik Tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015**". Shalawat berangkaikan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menerangi hidup dan kehidupan kita berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dra. Rahmanelli, M.Pd sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan perhatian bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Widya Prarikeslan S.Si, M.Si sebagai penguji I, ibu Ratnawilis S.Pd, M.P selaku penguji II, dan Bapak Drs. Afdhal M.Pd selaku penguji III yang telah menguji dan memberikan saran dan kritikan terhadap skripsi penulis
3. Ketua prodi Geografi Ibu Widya Prarikeslan S.Si, M.Si, sekretaris jurusan Geografi ibu Dra. Ahyuni M.T dan ketua jurusan Geografi ibu Dra. Yurni Suasti M.Si

4. Bapak Nasrun dan ibu Nurbaida, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan perhatian, pengertian, pengorbanan dan doa yang senantiasa menyertai penulis.
5. Kepada para sahabat, terkhusus Ahkmad Eduardi, Nia Audina yang telah membantu penulis dalam pembuatan peta dan mau menjadi pembimbing non formal penulis. Kepada Aisyah, Deri, Cici, Septi dan Rahmat yang telah nyinyir menyuruh penulis untuk rajin mengerjakan skripsi. Terimah kasih sahabat
6. Rekan RAOK BEM FIS 56 dan rekan rekan Geografi NK 2013, genk KITA, yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan berharga demi penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga Besar UK-WP2SOSPOL UNP, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berdiam diri, rumah kedua, dan tempat tidur untuk penulis dalam proses membuat skripsi ini

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis berupa pahala dan kemuliaan di sisi-Nya.

Padang, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR GRAFIK ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 1
2. Identifikasi Masalah 11
3. Batasan Masalah 11
4. Rumusan Masalah 12
5. Tujuan Penelitian 12
6. Manfaat Penelitian 13
BAB II KAJIAN TEORI
1) Konsep Teori 14
1. Geografi Politik 15
2. Pendekatan Geografi 17
3. Konsep Geografi 19
4. Politik 22
5. Pemilihan Umum 23
6. Pemilih 27
2) Penelitian Relevan 42
3) Kerangka Konseptual 46
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 49
B. Setting dan Subyek Penelitian 49
C. Defenisi Operasional 49
D. Populasi dan Sampel 50
E. Jenis Data 53

F. Teknik Pengumpulan Data..... 54
G. Teknik Pengelolaan Data 56
H. Metode Analisa Data..... 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Wilayah Penelitian..... 59
B. Hasil Penelitian 64
C. Pembahasan..... 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 98
B. Saran 98
DAFTAR PUSTAKA..... 100
LAMPIRAN 102

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

Tabel 1.1. Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Kab. Solok Selatan Tahun 2015 5
Tabel 1.2. Jumlah Pemilih Pilkada Kab. Solok Selatan Tahun 2015 7
Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian dengan Penelitan Sebelumnya 49
Tabel 3.1. Defenisi Operasional..... 50
Tabel 3.2. Persebaran Responden Penelitian 53
Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kab. Solok Selatan..... 63
Tabel 4.2. Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur..... 64
Tabel 4.3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 66
Tabel 4.4. Jumlah Responden Berdasarkan Agama..... 68
Tabel 4.5. Jumlah Responden Berdasarkan Tingat Pendidikan..... 69
Tabel 4.6. Jumlah Responden Berdasarkan Tingat Pekerjaan/Profesi 71
Tabel 4.7. Jumlah Responden Berdasarkan Suku..... 74
Tabel 4.8. Jumlah Responden Tingkat Pendapatan 76

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

Gambar 1. Kerangka Konseptual 48
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 58
Gambar 3. Peta Daerah Kemenangan Pasangan Calon..... 80

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik

Grafik 1.1. Hasil Rekapitulasi Suara Per-Kecamatan..... 6
Grafik 1.2. Jumlah Pemilih Pada Pilkada Kab. Solok Selatan Tahun 2015..... 8
Grafik 3.1. Persebaran Responden Penelitian 50
Grafik 4.1. Pilihan Responden Berdasarkan Kelompok Umur 64
Grafik 4.2. Pilihan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 66
Grafik 4.3. Pilihan Responden Berdasarkan Agama 68
Grafik 4.4. Pilihan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 69
Grafik 4.5. Pilihan Responden Berdasarkan Pekerjaan/Profesi 72
Grafik 4.6. Pilihan Responden Berdasarkan Suku 74
Grafik 4.7. Pilihan Responden Berdasarkan Pendapatan 76

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Geografi politik merupakan salah satu kajian geografi yang berkaitan dengan kehidupan manusia (*antroposfer*). Geografi politik mempelajari kekuatan suatu negara dilihat dari kepemilikan sumberdaya alam, pemilihan umum, dan tema lainnya yang didalamnya terjadi interaksi antara manusia dan lingkungan dalam kehidupan politik (Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007). Senada dengan itu Jay Singh Yadav (1996), menjelaskan bahwa salah satu atau setiap aspek dalam bidang politik yang dapat diidentifikasikan melalui komponen keruangan yang jelas adalah obyek kajian yang sah dalam geografi politik. Secara aplikatif Jai Singh Yadav (1996), menjelaskan bahwa geografi politik mampu berperan untuk menyebarluaskan informasi atau data spasial dan distribusi keruangan suara partai politik serta suara peserta pemilihan umum itu sendiri. Dalam hal ini kajian geografi akan membantu penyajian data spasial dan temporal dari hasil pemilihan umum di suatu wilayah.

Pernyataan diatas memperlihatkan bahwa geografi memiliki peranan yang penting di dalam politik. Fenomena-fenomena politik disuatu negara bisa dikaji lewat konsep keilmuan geografi. Oleh karena itu geografi politik dapat menjadi sebuah modal didalam membangun sebuah bangsa menjadi bangsa yang maju dan besar. Salah satu pokok bahasan Geografi Politik adalah Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk di dalamnya tentang pemilihan kepala daerah. Banyaknya

gejala pemilihan kepala daerah memberi kesempatan Geografi Politik untuk dapat berperan lebih besar.

Pemilihan umum selalu memperlihatkan sebaran kantong-kantong suara pasangan calon kepala daerah, akan terlihat dimana daerah pasangan calon kepala daerah unggul dan daerah mana pasangan calon kepala daerah mengalami kekalahan. Adapun jumlah suara yang didapatkan oleh setiap pasangan calon kepala daerah di daerah tertentu manjadi indikator apakah daerah tersebut menjadi wilayah kemenangan atau tidak. Besar kecilnya suara yang didapatkan oleh para calon kepala daerah tergantung banyak atau sedikitnya pemilih yang memilih pasangan tersebut. Saat proses pemilihan akan selalu ada faktor-faktor yang mendorong pemilih didalam menentukan pilihannya. Pemilih memiliki alasan dan kriteria tersendiri dalam memilih. Dalam konteks ini Perilaku pemilih sangat erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik atau kandidat yang akan dipilihnya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon, antara lain berdasarkan agama yang dianut, latar belakang keluarga, kelas dan status sosial, sifat dan kepribadian sang calon, hubungan kekerabatan, partai politik yang mendukung, rekam jejak atau kinerja yang sudah terbukti, ada juga yang memilih dikarenakan sudah diberikan uang maupun bantuan secara cuma cuma dari calon dan mereka tidak peduli apakah calon tersebut menang atau

tidak dan faktor untung-rugi dan sebagainya. Pernyataan penulis diatas sejalan dengan hal disampaikan A.A. Oka Mahendra (2005) bahwa latar belakang pilihan atas partai, calon dan isu ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih, seperti agama, etnik atau kedaerahan, dimana seseorang akan memilih partai atau tokoh tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial antara pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilihnya.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang lahir karena adanya otonomi daerah. Kabupaten Solok Selatan resmi menjadi Kabupaten/Kota pada tanggal 07 Januari tahun 2004, lewat Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten dengan ibu kota di Padang Aro ini terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Sangir dengan ibukota Lubuk Gadang, kecamatan Sangir Jujuan dengan ibukota Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan ibu kota Sungai Kunyit, kecamatan Sangir Batanghari dengan ibukota Abai, Kecamatan Sungai Pagu dengan ibukota Muaralabuh, Kecamatan Pauh Duo dengan ibukota Pakan Salasa, dan Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh dengan ibukota Pakan Rabaa. Kabupaten Solok Selatan dengan luas wilayah sekitar 3.346,20 Km2 menyimpan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi seperti pertanian, perkebunan dan kaya akan hasil tambang, seperti emas, biji besi.

Pada Pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 terdapat dua pasangan calon yang ikut dalam perhelatan demokrasi tersebut yakni pasangan nomor urut satu H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman, yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pasangan nomor urut dua H.Khairunas dan Edi Susanto yang diusung oleh partai Hati Nurani Rakyat (Hunura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), dan partai Demokrat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, pasangan H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman memperoleh 37.764 suara atau sekitar 50,33% sedangkan pasangan H. Khairunas dan Edi Susanto memperoleh 37.263 suara atau sekitar 49,67%. Hasil ini menunjukan bahwa pasangan H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 dengan unggul 0.66% dari pasangan H. Khairunnas dan Edi Susanto.

Berikut rincian perolehan suara masing-masing calon di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan

Tabel 1.1. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Daerah Kab. Solok Selatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak sah
		No. 1	No. 2		
1	Koto Parik Gadang Diateh	7.169	2.534	10.707	291
2	Pauh Duo	5.840	2.333	8.175	204
3	Sangir	5.256	15.488	20.492	456
4	Sangir Balai Janggo	2.445	4.433	6.632	176
5	Sangir Batanghari	3.117	3.680	6.797	223
6	Sangir Jujuan	2.875	4.111	6.986	139
7	Sungai Pagu	11.062	3.684	14.737	289
Jumlah		37.764	37.263	75.025	1.775

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 1.1. diatas dapat kita lihat bahwa pasangan calon H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman mendapatkan suara di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh 7.169 suara, Kecamatan Pauh Duo 5.840 suara, Kecamatan Sangir 5.256 suara, Kecamatan Sangir Balai Janggo 2.445 suara, Kecamatan Sangir Batanghari 3.117 suara, Kecamatan Sangir Jujuan 2.875 suara, dan Kecamatan Sungai Pagu 11.062 suara. Sedangkan pasangan calon H. Khairunnas dan Edi Santoso mendapatkan suara di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh 2.534 suara, Kecamatan Pauh Duo 2.333 suara, Kecamatan Sangir 15.488 suara, Kecamatan Sangir Balai Janggo 4.433 suara, Kecamatan Sangir Batanghari 3.680 suara, Kecamatan Sangir Jujuan 4.111 suara, dan Kecamatan Sungai Pagu 3.684 suara.

Grafik 1.1. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Kepala Daerah Kab. Solok Selatan Tahun 2015

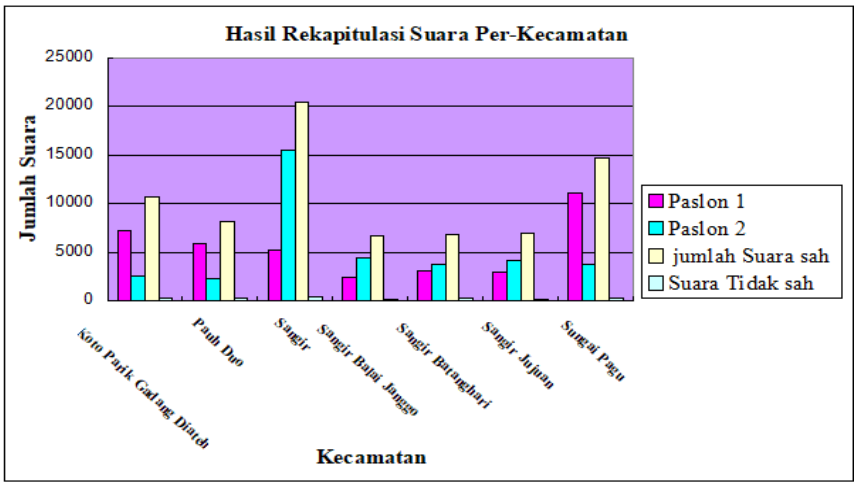

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Tahun 2015

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pasangan H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman terlihat mendominasi di kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, kecamatan Sungai Pagu, kecamatan Pauh Duo, sedangkan pasangan H. Khairunnas dan Edi Susanto mendominasi pada kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, dan Kecamatan Sangir Balai Janggo serta Kecamatan Sangir Batanghari.

Dari Tabel1.1. dan Grafik 1.1. diatas memperlihatkan bahwa peta petarungan politik dalam pilkada Kabupaten Solok Selatan begitu sengit dan ketat. Ini terlihat bahwa kedua pasangan calon mendapatkan suara yang hampir berimbang. Kemenangan pasangan nomor urut satu dengan selisih suara sebesar 0,6 % menandakan adanya kecenderungan sama kuat baik dari segi pemilih maupun dari segi kualitas pasangan calon itu sendiri.

Adapun dari segi pemilih, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang menyuarakan hak suaranya pada pemilihan umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 berjumlah 76. 297 atau sekitar 75% dari total jumlah pemilih terdaftar. Adapun kecamatan yang paling rendah tingkat partisipasi pemilih secara berturut-turut adalah Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sangir Batanghari, Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir dan Sangir Jujuan. Kecamatan Sangir Jujuan menempati tingkat partisipasi tertinggi dengan persentase pemilih adalah 80.51 % dari total pemilih terdaftar di kecamatan tersebut.

Berikut rincian jumlah pemilih pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015

Tabel 1.2. Jumlah Pemilih Pilkada Kab. Solok Selatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Pemilih	Daftar Pemilih Tetap
1	Koto Parik Gadang Diateh	10.991	18.104
2	Pauh Duo	8.379	11.781
3	Sangir	20.948	29.232
4	Sangir Balai Janggo	6.808	11.667
5	Sangir Batanghari	7.020	10.310
6	Sangir Jujuan	7.125	8.849
7	Sungai Pagu	15.026	21.680

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 1.2. diatas diketahui bahwa jumlah pemilih tetap pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebanyak 18.104 orang dan 10.991 orang yang menggunakan hak pilih, Kecamatan Pauh Duo memiliki 11.781 pemilih

tetap dan pemilih yang menggunakan hak pilih 8.379 orang, Kecamatan Sangir Balai Janggo memiliki 29.232 orang pemilih tetap dan yang menggunakan hak pilih 20.948 orang, Kecamatan Sangir Batanghari memiliki 10.310 jumlah pemilih tetap dan 7.020 orang yang menggunakan hak pilih, Kecamatan Sangir Jujuan memiliki 8.849 jumlah pemilih tetap dan 7.125 orang yang menggunakan hak pilih serta Kecamatan Sungai Pagu memiliki 21.680 orang jumlah pemilih tetap dan 15.026 orang yang menggunakan hak pilihnya

Grafik 1.2 : Jumlah Pemilih Pada Pilkada Kab. Solok Selatan Tahun 2015

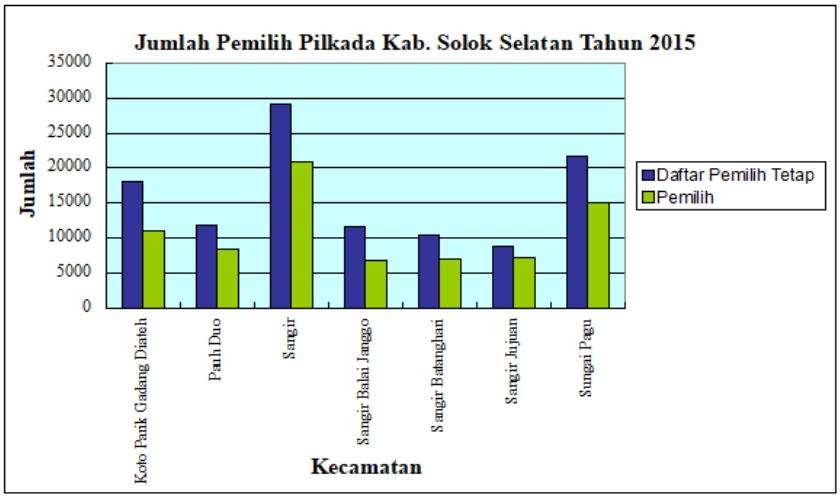

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Tahun 2015

Berdasarkan Grafik. 1.2 dan Tabel 1.2. diatas terlihat bahwa masing-masing kecamatan memiliki tingkat partisipasi didalam pemilihan umum beraneka ragam. kecamatan yang paling rendah partisipasinya secara berturut-turut adalah Kecamatan Sangir Balai Janggo (58.35%), Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (60.17%), Sangir Batanghari (68.08%), Sungai Pagu (69.30%), Pauh Duo (71.12 %), Sangir (71.56%) dan Sangir Jujuan (80.51%). Kecamatan Sangir Jujuan

menempati tingkat partisipasi tertinggi dengan persentase 80.51% dari total pemilih terdaftar di kecamatan tersebut.

Keikutsertaan masyarakat didalam memilih dipengaruhi adanya dorongan yang timbul didalam diri pemilih, dorongan itu bisa berasal dari luar dan didalam diri pemilih itu sendiri. Semakin tinggi dorongan tersebut maka semakin termotivasi seseorang untuk memilih dan begitu sebaliknya. Adapun motivasi masyarakat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 penulis rangkum lewat hasil observasi dilapangan pada tanggal 17 Januari 2016.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang bernama togok (39 tahun) warga Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan. Ia mengungkapkan bahwa ia memberikan hak suaranya dengan memilih pasangan nomor urut 2, karena pasangan tersebut pernah memberikan dia pekerjaan .

> "*Ambo mamiliak kapatang lai satoh..ambo piliah uda naskilin. Yo uda Naskilin alah manolong ambo mancarian karajo dulu. Jadi sagan kalau indak mamilih liaw*" (Sumber : Observasi Lapangan)

Berbeda dengan apa yang disampaikan Iyon, bapak Kawit, seorang tokoh masyarakat di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu memaparkan bahwa, beliau sangat bersemangat didalam menyuarakan hak pilihnya. Lanjut beliau, bahwa dalam memilih kandidat calon kepala dearah Kabupaten Solok Selatan beliau memperhatikan visi misi yang dibawahnya. Lanjut beliau, bahwa Lewat visi misi maka akan terlihat mana pasangan calon yang layak untuk mengemban

amanah. Dan pada akhirnya beliau menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon nomor satu yakni H. Muzni Zakaria dan H. Abdul Rahman.

> *"Mamiliah itu kewajiban kito. Bak keceak agamo ambo yaitu islam, badoso kalau nan wajib tu indak dikarajoan. Katiko Ambo kamamiliah, ambo mancaliak visi misi calon tu, disinan nampak ma nan alah patuik ma nan alun". Haji munih alah suaih aluh jo patuik* (Sumber : Observasi Lapangan)

Dari hasil observasi lapangan tersebut terlihat adanya perbedaan motivasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya. Hal ini dikarenakan adanya faktor tertentu yang melekat pada diri setiap pemilih. Faktor itulah yang melatarbelakangi pemilih dalam memberikan suaranya pada salah satu pasangan calon saat pemilihan umum itu berlangsung. Melihat bagaimana sebaran suara pemilih dapat kita analisis lewat distribusi keruangan hasil pemilu itu sendiri sedangkan faktor pendorong pemilih dalam memberikan hak suaranya dapat kita analisis lewat faktor sosiologis pemilih.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka perlu adanya penelitian untuk meneliti bagaimana distribusi keruangan serta keterkaitan faktor sosiologis pemilih tentang perolehan suara setiap pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015. Maka dari itu judul penelitian ini adalah "**Kajian Geografi Politik Tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan mengenai masalah-masalah yang terkait dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 maka masalah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pemenang dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 unggul dengan selisih suara yang tipis.
2. Adanya tingkat partisipasi dan motivasi pemilih yang beragam didalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015.
3. Terdapat pola distribusi keruangan perolehan suara pasangan calon kepala daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015.
4. Adanya faktor sosiologis pemilih yang mempengaruhi perolehan suara setiap pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan penelitian dapat dibatasi sebagai berikut:

1. Distribusi keruangan perolehan suara setiap pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015.
2. keterkaitan faktor sosiologis pemilih tentang perolehan suara setiap pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana distribusi keruangan perolehan suara setiap pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 ?
2. Bagaimana faktor sosiologis pemilih tentang perolehan suara setiap pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Distribusi keruangan perolehan suara pasangan calon kepala daerah Kabupaten Solok Selatan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015.
2. Faktor sosiologis pemilih tentang perolehan suara pasangan calon kepala daerah Kabupaten Solok Selatan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program dalam meningkatkan suara pemilih dalam pemilu.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Geografi Politik

Menurut *Ad Hoc Commitee on Geography, Association of American Geographers* (Glassner, 1995), geografi politik adalah sebagai kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Sejalan dengan itu, menurut Weigert (Glassner, 1995), geografi politik merupakan bagian dari geografi manusia yang memperhatikan salah satu aspek tertentu dari hubungan manusia dan alam, serta segala bentuk tipikal hubungan antara faktor-faktor geografis dan entitas politik. Jackson (Glassner, 1995) membuat definisi geografi politik adalah studi tentang fenomena politik dalam konteks wilayah. Dalam definisi yang lebih panjang dan detail, Kaperson dan Minghi (Glassner,1995) menjelaskan bahwa Geografi politik merupakan studi tentang struktur keruangan dan kewilayahan proses-proses politik dan sistem-sistem sosial, serta interaksi antara proses dan sistem politik atau sederhananya merupakan analisis keruangan tentang fenomena politik.

Harsthone dalam Daljoeni (1991) mengemukakan definisi geografi politik sebagai ilmu yang mempelajari keseiringan spasial (*spatial concomitants*) dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Gejala politik yang ditangkap oleh geograf adalah pengorganisasian ruang secara politik pada berbagai level, baik nasional, regional, maupun lokal. Berbeda dengan Cressey

dalam Suharyono dan Moch Amien (1994), geografi politik merupakan penerapan prinsip-prinsip geografi untuk memahami masalah-masalah politik dalam negara dan internasional. Maka perlu pertimbangan fakta-fakta mengenai lokasi, perbatasan dan koherensi internal yang berkaitan dengan usaha penyejahteraan bangsa.

Berdasarkan dari beberapa definisi geografi politik diatas, maka dapat diketahui bahwa kajian geografi politik itu sangat luas. Namun yang jelas dalam studinya terdapat komponen geografi dan komponen politik yang saling berinteraksi untuk dianalisis dalam konteks keruangan.

2. Pendekatan Geografi

Dalam geografi untuk mendekati suatu permasalaha, digunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan keruangan (*spatial approach*), pendekatan ekologi (*ecological approach*), dan pendekatan kompleks wilayah (*regional complex approach*), (Bintarto dan Surastopo, 1981).

a. Pendekatan Keruangan

Analisa keruangan mempelajari perbedaan lokasi mengenai sifat - sifat penting atau seri sifat- sifat penting. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam analisa keruangan yang harus diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancangkan. Analisa keruangan dapat diketahui dari pengumpulan data lokasi yang terdiri dari data titik

(*point data*) seperti: data ketinggian tempat, data sampel tanah, data sampel batuan, dan data bidang (*areal data*) seperti: data luas hutan, data luas daerah pertanian, data luas padang alang-alang.

b. Pendekatan Ekologi

Studi mengenai interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan disebut ekologi, sehingga dalam mempelajari ekologi seseorang harus mempelajari organisme hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan serta lingkungannya seperti *litosfer, hidrosfer, atmosfer*. Organisme hidup dapat pula mengadakan interaksi dengan organisme yang lain. Manusia merupakan satu komponen dalam organisme hidup yang penting dalam proses interaksi. Oleh karena itu muncul pengertian ekologi manusia (*human ecology*) dimana dipelajari interaksi antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya.

c. Pendekatan Kompleks Wilayah

Kombinasi antara analisa keruangan dan analisa ekologi disebut analisa kompleks wilayah. Dalam analisa ini,wilayah-wilayah tertentu didekati dengan pengertian *areal differentiation* yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Pada analisa ini diperhatikan pula mengenai penyebaran fenomena tertentu (analisa keruangan) dan interaksi antara variabel manusia dan lingkungannya untuk kemudian dipelajari kaitannya sebagai analisis kelingkungan.

3. Konsep Geografi

Geografi memiliki sepuluh konsep-konsep esensial (Suharyono dan Moch Amien, 1994), antara lain:

a. Konsep Lokasi

Lokasi sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya yang dapat memberi arti sangat menguntungkan ataupun merugikan. Lokasi digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer karena lokasi suatu objek akan membedakan kondisi di sekelilingnya.

b. Konsep Jarak

Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan atau keperluan pokok kehidupan, pengangkutan barang dan penumpang. Jarak dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh baik yang dikaitkan dengan waktu perjalanan yang diperlukan ataupun satuan biaya angkutan.

c. Konsep Aksesibilitas

Aksesibilitas juga berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Tempat-tempat yang memiliki keterjangkauan tinggi akan mudah mencapai kemajuan dan mengembangkan perekonomiannya.

d. Konsep Pola

Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik fenomena alami (misalnya jenis tanah, curah hujan, persebaran, vegetasi), ataupun fenomena sosial budaya (misalnya permukiman, persebaran penduduk, pendapatan, mata pencaharian).

e. Konsep Morfologi

Morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Bentuk daratan merupakan perwujudan wilayah yang mudah digunakan untuk usaha-usaha perekonomian.

f. Konsep Aglomerasi

Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan paling menguntungkan baik karena kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor yang menguntungkan.

g. Konsep Nilai Kegunaan

Nilai kegunaan fenomena atau sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif artinya tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu.

h. Konsep Interkasi Interdependensi

Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya-daya, objek atau tempat satu dengan tempat lain nya.

i. Konsep Diferensiasi Area

Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak individualis tersendiri sebagai suatu *region* yang berbeda dari tempat atau wilayah yang lain. Unsur atau fenomena lingkungan bersifat dinamis dan interaksi atau integrasinya juga menghasilkan karakteristik yang berubah dari waktu ke waktu.

j. Konsep Keterkaitan Keruangan

Keterkaitan keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial.

4. Politik

a. Pengertian

Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani), yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti polities (warga negara), politikos (kewarganegaraan atau *civic*), dan politike tehne (kemahiran politik), dan politike epistem (ilmu politik), (Cholisin, 2003:1).

Sedangkan menurut Meriam Budiardjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. (Meriam Budiardjo, 2001). Jadi politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri.

Lain lagi pandangan dari Ramlan Surbakti (1992) , yang menyatakan bahwa politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Sedangkan Menurut Hasan Al Banna (Usman Abdul Mu'iz, 2000). Politik adalah upaya memikirkan persoalan internal (mengurus persoalan pemerintah, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan kepada terhadap penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan), dan persoalan eksternal umat/rakyat (memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukan ditengah-tengah bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusanya), memberikan perhatian kepadanya, dan bekerja demi kebaikan seluruhnya (kemaslahatan umat).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warga negara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik. Jadi politik memiliki arti yang luas.

b. Perilaku Politik

Perilaku politik atau (Inggris:*Politic Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik

Menurut Ramlan Surbakti (1992) yang dikutip oleh Cholisin, dkk (2003). Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat proses memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Adapun rumusan lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama,serta kekuasaan.

Sejalan dengan pengertian politik, menurut Sudijono Sastroadmodjo (1995). Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang

memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.

c. Partai Politik

Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, partai politik memiliki program-program politik yang dilakukan dengan bersama-sama dari setiap masing-masing anggotanya, serta memiliki tujuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *"Dasar-dasar Ilmu Politik"* pengertian partai politik adalah: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstutisional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanan mereka. (Budiardjo, 2004).

Definisi di atas didukung oleh Raymond Garfield Gettell yang mengungkapkan pendapatnya tentang partai politik seperti yang dikutip oleh H.B Widagdo dalam bukunya *"Manajemen Pemasaran Partai Poltik Era Reformasi"* yaitu:

"A political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act as a political unit and who and, by the use of their voting power, aim to control the geverment and carry out the general polities".("Partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi,

yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang mempunyai kekuasaan memilih, bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka"). (Gettell dalam Widagdo).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka partai politik tidak hanya kumpulan orang-orang yang terorganisir, tetapi didalamnya terdapat pula tugas dan fungsi, ideologi-ideologi, program-program, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk menguasai dan merebut kekuasaan politik.

5. Pemilihan Umum

a. Pengertian

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara"

b. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selengarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (BAB I Kententuan Umum Pasal I ayat 1 RUU Penyelengaraan Pemilu). Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu agenda politik yang dilaksanakan lima tahun sekali yang pada awalnya hanya untuk memilih anggota parlemen dari partai politik saja yaitu anggota DPR RI, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II, serta wakil-wakil daerah non parpol yaitu anggota DPD.

Namun setelah amandemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 2002 maka pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakilnya yang kemudian disebut Pilpres yang pertama kali dilakukan pada tahun 2004, dan sesuai dengan UU No 22 Tahun 2007 dimasukan pula mengenahi pemilihan langsung kepala daerah (Gubernur,Walikota/Bupati) yang kemudian dinamakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Penyelengara pemilu adalah adalah lembaga yang menyelengarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelengaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara

demokratis (BAB I Kententuan Umum Pasal I ayat 5 RUU Penyelengaraan Pemilu)

c. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015

Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal yang terdapat pada peraturan PKPU nomor 2 tahun 2015. Adapun tahapan pemilihan terdiri atas dua

1) Tahapan persiapan

Adapun tahapan persiapan terdiri atas

a) Perencanaan program dan anggaran
b) Penyusunan peraturan penyelanggaraan pemilihan
c) Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis
d) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
e) Pendaftaraan pemantau pemilihaan
f) Pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihaan (DP4)
g) Pemuktahiran data dan daftar pemilih

2) Tahapan penyelenggaraan

Adapun tahapan penyelanggaraan terdiri dari :

a) Pencalonan, terdiri dari :

i. syarat dukungan pasangan calom perseorangan
ii. pendaftaraan pasangan calon

b) Sangketa tata usaha negara pemilihan

c) Kampanye,

   i. Debat publik/debat terbuka antar calon

   ii. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye

d) Laporan dan audit dana kampanye

e) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

f) Pemungutan dan perhitungan suara

g) Pemungutan dan perhitungan suara

h) Rekapitulasi hasil penghitungan suara

i) Penetapan rekapitulasi suara perhitungan suara

j) Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan

k) Sangketa perselisihan hasil pemilihan

l) Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilij paska putusan Mahkamah

m) Pengusualn pengesahan-pengesahan pasangan calon terpili

n) Evaluasi dan pelaporan

6. Pemilih

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilih diartikan sebagai Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, menurut Firmanzah (2007:102) pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi yang dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Namun, menurut Joko J. Prihatmoko (2005). pemilih yang merupakan bagian dari masyarakat luas bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka menunggu sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

b. Perilaku Pemilih

Menurut Mahendra (2005), perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu. Kemudian, Kristiadi (1996) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasional pemilih atau disebut teori voting behavioral. Lebih lanjut, Jack C. Plano (1985) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.

Sementara perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti dalam Efriza (2012) adalah :

> "Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu."

Pemberian suara (*voting*) secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menentukan pendapatnya dan ikut dalam menentukan konsensus diantara anggota kelompok terhadap keputusan atau kebijakan yang akan diambil.

Berdasarkan pendapat yang diuraikan di atas, maka perilaku pemilih dapat diartikan sebagai sebuah tindakan seseorang maupun sekelompok

orang (masyarakat) yang berkaitan dengan kepentingan atau tujuan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

d. Jenis-Jenis Perilaku Pemilih

Menurut Firmanzah (2007), perilaku pemilih diklasifikasikan dalam empat jenis. Adapun empat jenis perilaku pemilih tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemilih Rasional

Dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih rasional *(rational voter*), dimana pemilih memiliki orientasi tinggi pada *policy-problemsolving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Ciri khas pemilih jenis ini adalah tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor seperti faham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan dibandingkan faham dan nilai partai dan kontestan. Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik atau calon kontestan ingin menarik perhatian pemilih dalam matriks ini, mereka harus mengedepankan solusi logis akan permasalahan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial-budaya,

hubungan luar negeri, pemerataan pendapatan, disintegrasi nasional, dan lain - lain. Pemilih tipe ini tidak akan segan-segan beralih dari sebuah partai atau seorang kontestan ke partai politik atau kontestan lain ketika mereka dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan.

2) Pemilih Kritis

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah *rational voter* untuk berpaling ke partai lain. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme.

Pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik dan kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya, pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini akan selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan

kebijakan yang dibuat. Tiga kemungkinan akan muncul ketika terdapat perbedaan antara nilai ideologi dengan platform partai yaitu memberikan kritik internal, frustasi, dan membuat partai baru yang memiliki kemiripan karakteristik ideologi dengan partai lama.

Kritik internal merupakan manifestasi ketidaksetujuan akan sebuah kebijakan partai politik atau seorang kontestan. Ketika pemilih merasa kritikannya tidak difasilitasi oleh mekanisme internal partai politik, mereka cenderung menyuarakannya melalui mekanisme eksternal partai, umpamanya melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Frustasi merupakan posisi yang sulit bagi pemilih jenis ini. Di satu sisi, mereka merasa bahwa ideologi suatu partai atau seorang kontestan adalah yang paling sesuai dengan karakter mereka, tapi di sisi lain mereka merasakan adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan yang akan dilakukan partai atau kandidat tersebut.

Biasanya pemilih ini akan melihat-lihat dahulu (*wait and see*) sebelum munculnya ide kemungkinan yang ketiga, yaitu membentuk partai baru. Pembuatan partai biasanya harus di pelopori oleh tokoh-tokoh yang tidak puas atas kebijakan suatu partai. Mereka memiliki kemampuan untuk menggalang massa, ide, konsep, dan reputasi untuk membuat partai tandingan dengan nilai ideologi yang biasanya tidak berbeda jauh dengan partai sebelumnya.

3) Pemilih Tradisional

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambulan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budayanya, nilai, asal-usul, faham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih suatu partai politik. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, serta pembangunan dianggap sebagai parameter kedua. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta faham yang dianut.

4) Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun dan partai

apapun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa bangsa kearah perbaikan yang mereka harapkan. Selain itu, mereka tidak memiliki ikatan emosional dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan.

e. Pendekatan Perilaku Pemilih

1) Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan Sosiologis atau disebut juga mazhab columbia sebagaimana dikemukakan oleh A.A. Oka Mahendra (2005) menyatakan bahwa latar belakang pilihan atas partai, calon dan isu ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih. Misalnya agama, etnik atau kedaerahan, dimana seseorang akan memilih partai atau tokoh tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial antara pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih. Sejalan dengan pendapat di atas, Muhammad Asfar dalam Adman Nursal (2004) mengungkapkan lebih dalam bahwa, "Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokkan sosial-usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan perilaku pemilih".

Sedangkan menurut Khoirudin (2004) pendekatan sosiologis melihat masyarakat sebagai satu kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang

terbawah hingga teratas dimana menurut paham ini tingkatan-tingkatan atau kelompok yang berbeda inilah yang membentuk persepsi, sikap, keyakinan, dan sikap politik dari masing-masing individu. Hal ini menunjukkan bahwa subkultur tertentu dalam masyarakat memiliki kognisi sosial tertentu yang akhirnya bermuara pada perilaku tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model sosiologis mengasumsikan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosial dan pengelompokan sosial pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih atau dengan kata lain, pemilih memiliki orientasi tertentu terkait karakteristik dan pengelompokan sosialnya dengan pilihan atas partai atau calon tertentu. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini adalah sebagai berikut :

a) Pengelompokkan sosial dilihat dari pola hubungan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan serta kelompok sosial lainnya seperti profesi dan organisasi yang diikuti.
b) Karakteristik sosial yang dilihat orientasi pemilih terhadap karakteristik sosial kandidat seperti usia , jenis kelamin, agama, etnis dan lain -lain.

Mengenai pengkategorian kerakteristik sosial dan pengelompokan sosial ini dibagi menjadi tiga tipe oleh Bone dan Ranney dalam Adman

Nursal (2004) yakni kelompok kategori yang terdiri atas orang -orang yang memiliki karakteristik politik yang berbeda-beda dan tidak menyadari karakteristik dan tujuan kelompoknya, dimana perbedaan ini terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap peristiwa politik, pengalaman politik dan peran-peran sosial. Pengelompokkan kategorial ini terbentuk atas dasar faktor-faktor berikut :

a) Perbedaan jenis kelamin
b) Perbedaan usia
c) perbedaan pendidikan

Kategori kedua adalah kelompok sekunder yakni kelompok yang menyadari identifikasi dan tujuan kelompoknya dan terdapat ikatan psikologis anggota terhadap kelompoknya, kelompok ini diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Pekerjaan
b) Kelas sosial dan status sosial ekonomi
c) Kelompok-kelompok etnis seperti ras, agama, dan daerah asal.

Tipe kelompok yang terakhir adalah kelompok primer yang terdiri atas orang-orang yang melakukan kontak dan interaksi langsung secara teratur dan sering, kelompok ini memiliki pengaruh yang peling kuat

dan langsung terhadap perilaku politik seseorang. Mereka yang tergolong kelompok ini adalah :

a) Pasangan suami istri
b) Orang tua dan anak-anak.
c) Teman sepermainan

2) Pendekatan Psikologis (*Mazhab Michigan*)

Pendekatan psikologis atau yang sering disebut juga mazhab michigan sebagaimana diungkapkan oleh A.A. Oka Mahendra (2005) bahwa,

> "Faktor-faktor sosiologis seperti kesamaan agama atau etnik tidak akan fungsional mempengaruhi keputusan pemilih, jika sejak awal belum terbentuk persepsi dan sikap pribadi pemilih terhadap faktor-faktor sosial, maupun terhadap faktor sosial yang dilekatkan pada partai atau calon tertentu. Harus sudah terbentuk dalam diri pemilih bahwa dirinya termasuk dalam satu golongan atau segmen sosial tertentu, sekaligus terbentuk persepsi dari diri yang bersangkutan bahwa partai atau figur tertentu juga diidentikkan dengan kelompok atau segmen sosial yang sama dengan diri mereka".

Menurut Adman Nursal (2004) mazhab ini menggarisbawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Terbentuknya persepsi dan sikap ini diawali dengan proses sosialisasi yang panjang yang membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik dan menimbulkan identifikasi tanpa disadari.

Model psikologis menggunakan konsep kunci yakni identifikasi partai yang mana proses sosialisasi yang dijalani akan membentuk ikatan psikologis seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Identifikasi partai merupakan rasa keterikatan individu terhadap partai sekalipun ia bukan anggota. Perasaan itu tumbuh sejak kecil dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan keluarga. Dengan demikian pendekatan ini saling terkait dengan pendekatan sosiologis dimana identifikasi partai berkaitan dengan pengelompokan sosial.

Berdasarkan konsep tindakan komunikasi Dann Nimmo dalam Adman Nursal (2004) menyebut pemilih yang dipengaruhi oleh faktor identifikasi ini sebagai pemberi suara reaktif. Nimmo mengasumsikan bahwa,

> "Manusia beraksi terhadap rangsangan secara pasif dan terkondisi, perilaku pemberi suara dibentuk oleh faktor jangka panjang terutama faktor sosial. Pengelompokan sosial dan demografi berkorelasi dengan identifikasi partai. Hal ini karena karakter kelompok sosial dan demografi dimana pemilih berada memberi pengaruh sangat penting dalam proses pembentukan ikatan emosional pemilih dengan simbol-simbol partai. Simbol-simbol kelompok dan ikatan kesejarahan dapat melekat pada simbol-simbol partai sehingga tercipta identifikasi"

Faktor emosional sangat menentukan pembentukan perilaku pemilih dalam pendekatan ini yang melibatkan peran keluarga dan lingkungan sekitar individu yang berperan aktif dalam proses sosialisasinya. Dalam hal ini, pola hubungan yang merupakan bentukan budaya juga mempengaruhi emosional pemilih seperti halnya tokoh panutan yang

menimbulkan identifikasi. Gerungan dalam Adman Nursal (2004) menyebutkan bahwa identifikasi adalah dorongan untuk identik dengan orang lain yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dianggapnya ideal dalam suatu segi. Sehingga faktor ketokohan juga berpengaruh kuat dalam membentuk perilaku pemilih.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Pendekatan Psikologis yaitu pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini adalah sebagai berikut:

a) Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.
b) Identifikasi partai, yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

3) Pendekatan Rasional (*Ekonomis*)

Jika pendekatan psikologis menjelaskan adanya pemilih tetap, sebagian pemilih juga ada yang merubah pilihannya dari pemilu kepemilu lainya. Peristiwa-peristiwa politik tertentu bisa merubah preferensi pilihan politik seseorang, hal inilah yang dijelaskan oleh pendekatan rasional. Adman Nursal (2004) menyebutkan bahwa:

> "Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partai".

Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilihan yang bersangkutan, sementara pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan. Kualitas kandidat memiliki dua variabel, yakni kualitas instrumental yaitu tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat bila telah menang dalam pemilihan, dan variabel kualitas simbolik, yaitu kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan sebagainya.

Pendekatan rasional mengantarkan pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai. Berdasarkan tindakan komunikasi dalam Adman Nursal (2004) Nimmo menggolongkan para pemilih ini sebagai pemberi suara yang rasional. Pemilih rasional ini memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapatkan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan dan kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis. Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang melihat bahwa pilihan pemilih adalah keputusan rasional pemilih dimana yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a) Orientasi visi misi yang diukur dari pengatahuan dan pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program yang ditawarkan calon.
b) Orientasi kandidat yang diukur dari kualitas kandidat meliputi kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan terkait kompetensinya dalam merealisasikan program yang ditawarkan.

4) Pendekatan Marketing

Dalam Adman Nursal (2004) menurut pendekatan yang dikembangkan oleh Newman dan Sheth ini terdapat tujuh domain kognitif terpisah dan berbeda yang mempengaruhi perilaku pemilih yakni :

a) Isu dan kebijakan politik *(issues and policies)*, merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang kelak.
b) Citra sosial *(social imagery)*, menunjukkan stereotif kandidat atau partai (citra kandidat atau paratai di mata pemilih) untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
c) Perasaan emosional (*emotional feelings*), dimensi emosional yang terpancar dari kontestan yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
d) Citra kandidat (*candidate personality*), mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
e) Peristiwa mutakhir *(current events)*, mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.

f) Peristiwa personal *(personal events)*, mengacu pada kehidupan peribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat.

g) Faktor-faktor epistemik *(epistemic issues)*, isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih tentang hal-hal baru.

Pendekatan ini merupakan bentuk strategi baru dalam menjaring suara dalam pemilihan, dimana fokus pendekatan ini melihat pemilihan langsung sebagai pasar yang didalamnya setiap kontestan harus mampu menguasai perilaku konsumen (pemilih) dan mampu menawarkan segala hal yang menjadi kebutuhan konsumen.

Beberapa hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan seorang pemilih dalam menentukan pilihannya dalam suatu pemilihan langsung. Secara umum berdasarkan hal-hal di atas keempat pendekatan ini, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional dan pendekatan marketing, terdapat keterikatan dan satu sama lain saling melengkapi.

B. Penelitian Yang Relevan

Handawati (2006) dalam penelitian yang berjudul "Kajian Prilaku Pemilih dalam Pelaksanaan Kepala Daerah (Prespektif Analisa Geografi)" hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kajian prilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah

sangat berhubungan dengan keadaan masyarakat secara demografis, sosiologis, dan psikologis untuk lebih holistik mengetahui kepala daerah pilihan masyarakat harus dilakukan melalui kajian geografi. Kajian geografi dengan ciri khas analisanya yang bersifat keruangan dan kewilayahan dapat menjawab penelitian-penelitian sosial.

Yani, Hayati, Eridiana (2008) dalam penelitian yang berjudul "Kajian Geografi Politik Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008" hasil penelitian ini menyimpulkan daerah kemenangan Hade, Aman, dan Dai tidak menunjukan pola keruangan yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah politik yang relatif homogen. Faktor-faktor yang menunjukan segregasi wilayah seperti petani, nelayan, di pegunungan, di pantai, atau berbahasa sunda, atau berbahasa jawa cirebon tidak nampak berpengaruh terhadap pilihan politik.

Glassner (1993) dalam kajian dengan judul *"Political Geographic"* yang berisi tentang pola dan sebaran suara partai politik di tiap distrik Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa beberapa hal penting yang masuk ke dalamnya geografi pemilihan umum adalah isu kampanye saat pemilu, kandidat/calon, pengaruh kampanye dan yang paling geografis diantara semuanya (most geogrphic of all) adalah "the neighborhood effect" (efek ketetanggaan). Yaitu hubungan antara hasil pemilu dengan rumah atau distrik sang calon/kandidat.

Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Dengan Penelitan Sebelumnya

Penulis	Rayuna Hedawati	Yani, Hayati, Eridiana	Glassner	Anggi Pradana wiranata
Tahun	2006	2008	1993	2018
Judul	Kajian Prilaku Pemilih Dalam Pelaksanaan Pilkada (Prespektif Geografi)	Pemilih Dalam Pelaksanaan Pilkada (Prespektif Geografi) Kajian Geografi Politik Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008	Political Geographic	Kajian geografi politik tentang hasil pemilihan kepala daerah kabupaten solok selatan tahun 2015
Tujuan	Mengetahui Distribusi Sebaran basis massa Calon Kepala Daerah	Mengetahui kondisi geografis kantong pemenangan pasangan Cagub Jabar 2008 Mengetahui faktorfaktor berpengaruh terhadap hasil Pilkada Jabar tahun 2008 Mengetahui apakah tiap dapil memiliki alasan-alasan yang sama untuk memilih Cagub Jabar 2008	Mengetahui pola dan sebaran hasil pemilihan umum pada distrik yang ada di Amerika Serikat	Mengetahui sejauh mana pengaruh faktor geografis dan faktor sosiologis terhadap hasil pemilihan umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2015
Metode	Diskripsi Kuantitatif	Pendekatan Diskriptif	Diskriptif	Deskripsi kuantitatif dan Kualitatif
Hasil	Kajian prilaku	Daerah	Beberapa hal	Pada pemilihan

	pemilih dalam pemilihan kepala daerah sangat berhubungan dengan keadaan masyarakat secara demografis, sosiologis, dan psikologis untuk lebih holistik mengetahui kepala daerah pilihan masyarakat harus dilakukan melalui kajian geografi. Kajian geografi dengan ciri khas analisanya yang bersifat keruangan dan kewilayahan dapat menjawab penelitianpenelitian sosial.	kemenangan Hade, Aman, dan Dai tidak menunjukan pola keruangan yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah politik yang relatif homogen. Faktor-faktor yang menunjukan segregasi wilayah seperti petani, nelayan, di pegunungan, di pantai, atau berbahasa sunda, atau berbahasa jawa cirebon tidak nampak berpengaruh terhadap pilihan politik.	penting yang masuk ke dalamnya geografi pemilihan umum adalah isu kampanye saat pemilu, kandidat/calon, pengaruh kampanye dan yang paling geografis diantara semuanya (most geogrphic of all) adalah "the neighborhood effect" (efek ketetanggaan). Yaitu hubungan antara hasil pemilu dengan rumah atau distrik sang calon/kandidat	kepala daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2015 terdapat segresi wilayah distribusi suara dimana pasangan H.Muzni Zakaria dan H. Abdur Rahman menguasai Kabupaten Solok Selatan di bagian Barat yang dikenal dengan daerah Muarlabuh atau *alam surambi sungai pagu,* sedangkan pasangan H. Khairunnas dan Edi Susanto menguasai solok selatan bagian Timur yang dikenal dengan daerah Sangir atau *Rantau XII Koto*. Adapun Faktor sosiologis pemilih seperti agama tidak menjadi pertimbangan pemilih didalam menentukan

				hak politiknya sedangan faktor sosiologis pemilih seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, suku dan tingkat pendapatan pemilih cenderung menjadi pertimbangan pemilih didalam menentukan pilihan politiknya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015.

Sumber : Data Hasil Olahan Tahun 2017

C. **Kerangka Konseptual**

Adapun rincian dari kerangka konseptual ini penulis bagi dalam beberapa bagian

1. Penulis memulai dari pemilihan kepala daerah kabupaten solok selatan sebagai acuan utama
2. Membagi menjadi dua bagian yakni 1) faktor sosiologis pemilih dan 2) distribusi keruangan

3. Pada bagian faktor sosiologis pemilih memuat indikator seperti jenis kelamin, umur, agama, tingkat pendidikan, suku, pekerjaan, dan tingkat pendapatan, kemudian dianalisis dengan menggunakan instrumen angket dan wawancara sehingga menghasilkan keterkaitan faktor sosiologis pemilih tersebut dengan perolehan suara setiap pasangan calon kepala daerah. Sedangkan pada bagian distribusi keruangan memuat data suara pasangan calon yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum, data tersebut kemudian digunakan untuk dibuat peta perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan sehingga terlihat jumlah suara masing masing pasangan calon di setiap kecamatan, dari peta suara pasangan calon disetiap kecamatan maka nampak dimana suara pasangan calon unggul dan kalah kemudian dibuat peta daerah kemenangan pasangan calon agar semakin memperlihatkan daerah-daerah kemenangan masing-masing pasangan calon, setelah peta ini selesai dibuat kemudian dianalisis berdasarkan konsep pola dan konsep lokasi sehingga menghasilkan analisis distribusi keruangan suara pasangan calon kepala daerah Kabupaten Solok Selatan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015..

Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian

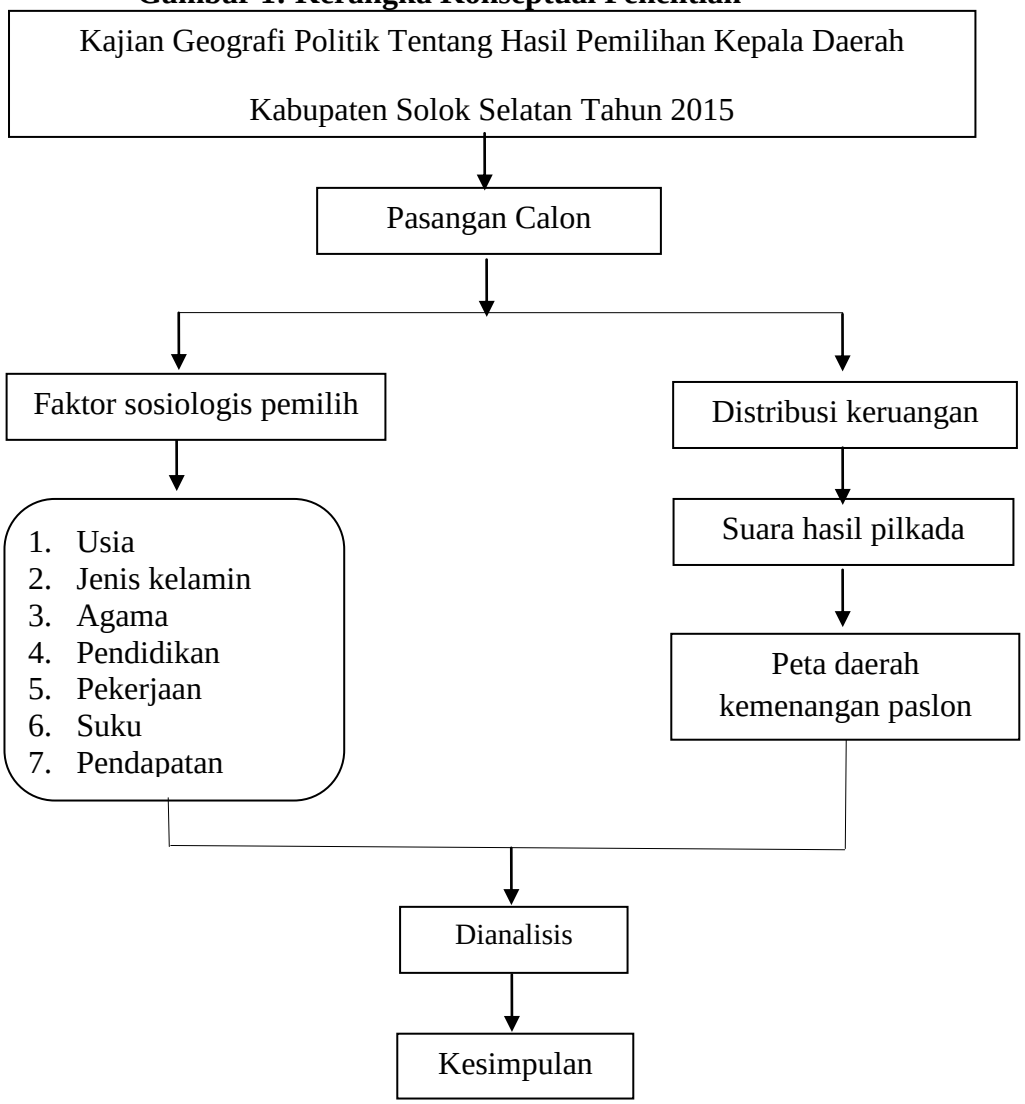

Sumber : Data Hasil Olahan Tahun 2017

BAB V
PENUTUP

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

7. Pada pemilihan kepala daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2015 terdapat segresi wilayah distribusi suara dimana pasangan H.Muzni Zakaria dan H. Abdur Rahman menguasai Kabupaten Solok Selatan di bagian Barat yang dikenal dengan daerah Muarlabuh atau *alam surambi sungai pagu*, sedangkan pasangan H. Khairunnas dan Edi Susanto menguasai solok selatan bagian Timur yang dikenal dengan daerah Sangir atau *Rantau XII Koto*
8. Adapun Faktor sosiologis pemilih seperti agama tidak menjadi pertimbangan pemilih didalam menentukan hak politiknya sedangan faktor sosiologis pemilih seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, suku dan tingkat pendapatan pemilih cenderung menjadi pertimbangan pemilih didalam menentukan pilihan politiknya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2015.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Melihat adanya pola dan persebaran suara sehingga adanya daerah basis dan non basis, ini tidak lepas dari faktor sosiologis masyarakat yang ada

2. diwilayah tersebut. Bagi kepala daerah yang terpilih hendaknya mampu memberikan sumbangsih yang adil bagi setiap daerah. Jangan hanya berfokus membangun daerah basis suara kemenangannya saja.
3. Perlu diadakannya pendidikan politik kepada semua warga Negara agar Indonesia secara menyeluruh memiliki pemilih-pemilih yang cerdas dan buah produk dari pilihannya tersebut mampu membawa daerah dan bangsa nya menjadi lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

————————. 2015. Solok Selatan Dalam Angka 2015. BPS Kabupaten Solok Selatan.

Abdurrachmat. 1982. *Pengantar Geografi Politik:* Bandung. Jurusan Pendidikan. Geografi IKIP

R.B, gunardo,2011. *Diktat geografi politik.* UNY

Moleong Lexy, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Yani, A. Hayati S. 2007. *Geografi Politik: Bandung*. PT Reftika Aditama.

Acuan dari Jurnal

Saleh, Hasanuddin M., "*Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Di Riau: Suatu Bahasan Awal"*. Makalah pada seminar yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau, 2 September 2007 di Pekanbaru.

Yani, A. Hayati, S. Eridina, W. 2008. *Kajian Geografi Politik Terhadap Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008*. Bandung. Jurusan Pendidikan Geografi UPI.

Acuan dari Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2007 Pemilihan Umum Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.

Acuan dari Skripsi

Hendawati, Rayuna. 2006. *Kajian Perilaku Pemilih Dalam Pelaksanaan Pilkada (Perspektif Analisa Geografi).* Skripsi Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Purnawan, Hanggoro. 2011. *Preferensi Peta Pemilih Pada Pemilukada Kota Surakarta Tahun 2010 Berbasis Sistem Informasi Geografis.* Skripsi Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Wicaksana, Afief Bagus. 2013. Analisis *Distribusi Keruangan Basis PemilihPartai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2004 Dan 2009 DiKabupaten Magelang.* Skripsi Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Acuan dari Internet

http//www. KPUD Bondowoso/prilaku pemilih. go. id diakses pada 23 januari 2016

http//www. KPU. go. Id diakses pada 23 januari 2016

http//www. KPUD Solok Selatan. go. id diakses pada 23 januari 2016

http//www. AntaraSUMBAR/jumlah DPT Pemilih KAB.Solok Selatan. go. id diakses pada 30 maret 2016